

**PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN
KEUANGAN KOTA GORONTALO**

OLEH :

**NURLELA ASTA HADJU
E11.18.055**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN**PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN
KEUANGAN KOTA GORONTALO**

OLEH :
NURLELA ASTA HADJU
E11.18.055

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
.....2021

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM
NIDN: 0002057501

Pembimbing II



Yusrin Abdul, SE., MSA
NIK: 0120120194
21/09/2021

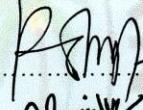
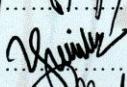
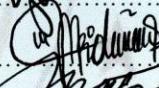
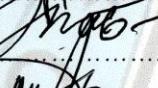
HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

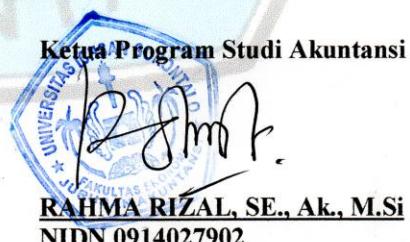
Oleh
NURLELA ASTA HADJU
E11.18.055

**Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Rabu, 05 Mei 2021**

Komisi Pengaji :

1. Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si : 
2. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak : 
3. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak : 
4. Dr. Bala Bakri, SE., MM : 
5. Yusrin Abdul, SE., MSA : 

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 5 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nurlela Asta Hadju

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*Memulai dengan Penuh Keyakinan,
Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan.*

Persembahan

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu Langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita.

Terimakasih untuk kedua orang tua saya atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Terimakasih untuk mas Hari Fitrianto atas pengorbanan, perjuangan yang luar biasa dan dukungan serta doa yang tanpa hentinya. Engkau yang selama ini sudah menjadi seseorang yang begitu special sekaligus bisa menjadi kakak maupun sahabat bagi saya. Engkau adalah tempat saya berlari Ketika saya merasa tidak ada yang memahami saya.

Terimakasih juga untuk para dosen pembimbing yang dengan sabar melayani saya selama ini. Serta ucapan terimakasih ini saya persembahkan untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terutama untuk seluruh teman-teman yang berada di fakultas ekonomi. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki. Sehingga masa kuliah 3,5 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

ABSTRAK

NURLELA ASTA HADJU. E1118055. PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penganggaran berbasis kinerja (X) yang mencakup tahap persiapan (X1), tahap ratifikasi (X2), tahap implementasi (X3) dan tahap pelaporan dan evaluasi (X4) baik secara simultan maupun parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyajian secara deskriptif. Metode analisis data menggunakan regresi berganda berdasarkan data dari populasi yang terdapat pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penganggaran berbasis kinerja (X) yang mencakup tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 87,6%. Tahap persiapan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 22,8%. Tahap ratifikasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,4%. Tahap implementasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 34,8%. Tahap pelaporan dan evaluasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,2%.



Kata kunci: penganggaran berbasis kinerja, akuntabilitas

ABSTRACT

NURLELA ASTA HADJU. E1118055. THE EFFECT OF THE PERFORMANCE-BASED BUDGETING ON THE ACCOUNTABILITY AT THE FINANCIAL AGENCY OF GORONTALO MUNICIPALITY

This research aims to find out and analyze to what extent the simultaneous and partial effects of the performance-based budgeting (X) covering preparation stage ($X1$), ratification stage ($X2$), implementation stage ($X3$), and reporting and evaluation stage ($X4$) on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality. The research method implemented is the quantitative approach descriptively presented. The data analysis applies a multiple regression referring to the population data at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality. The research results indicate that the performance-based budgeting (X) covering preparation stage ($X1$), ratification stage ($X2$), implementation stage ($X3$), and reporting and evaluation stage ($X4$) positively and significantly determine the accountability at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 87,6%. The preparation stage ($X1$) has a positive and significant effect on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 22,8%. The ratification stage ($X2$) has a positive and significant influence on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 26,4%. The implementation stage ($X3$) has a positive and significant impact on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 34,8%. The reporting and evaluation stage ($X4$) has a positive and significant effect on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 26,2%.

Keywords: *performance-based budgeting, accountability*



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mahakuasa yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam terang menderang. Selanjutnya penulis kembali mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayahnya, kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban keringat hingga doa yang terputuskan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai macam pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muh. Ichsan Gaffar.,SE.,M.AK.CSRS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Hi. Abd. Gaffar La Djokke.,M.Si selaku selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Ariawan, S.Psi SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Bapak Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM selaku pembimbing I dan Bapak Yusrin Abdul,SE.,MSA selaku pembimbing II yang selalu memberikan saran bagi penulis, seluruh staff dan dosen dilingkungan

Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik penulis hingga terselesainya studi di bangku perkuliahan, Orang tua yang selalu memberi dukungan dan dorongan dari segi Moril maupun Materil. Serta teman – teman jurusan Akuntansi 2017 yang telah memberikan sumbangsi pemikiran bagi penulis, kepada seseorang yang dengan sabar menemani dan memotivasi demi terselesainya Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kesalahan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan, olehnya kritik serta saran sangat dibutuhkan demi memberikan kesempurnaan dalam penulisan usulan penelitian ini.

Gorontalo, April 2021

Penulis
Nurlela Asta Hadju
E11.18.055

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9

BAB II KAJIAN PUSTKA, KERANGAKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 10

2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Anggaran	10
2.1.2 Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja.....	11
2.1.3 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.1.4 Tujuan Anggaran Berbasis	17
2.1.5 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja.....	18
2.1.6 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja.....	18
2.1.7 Unsur-unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja	19

2.1.8 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	19
2.1.9 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	20
2.1.9.1 Penetapan Strategi Organisasi	20
2.1.9.1 Penetapan Strategi Organisasi	20
2.1.9.3 Penetapan Aktivitas	20
2.1.10 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	21
2.1.11 Indikator Penganggaran Berbasis Kinerja	22
2.2.2 Pengertian Akuntabilitas	24
2.2.2.1 Macam-macam Akuntabilitas.....	24
2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas	25
2.2.2.3 Indikator Akuntabilitas	25
2.2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Hipotesis	30

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	33
3.1 Objek Penelitian	33
3.2 Metode Penelitian.....	33
3.2.1 Metode Yang Digunakan	33
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian	33
3.2.2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja.....	33
3.2.2.2 Akuntabilitas	34
3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.2.3.1 Populasi	37
3.2.1.2 Sampel	37
3.2.4 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data	37
3.2.4.1 Jenis Data.....	37
3.2.4.2 Sumber Data	37
3.2.4.2 Cara Pengumpulan Data	37
3.2.5 Metode Analisis Data	38
3.2.5.1 Uji Validitas.....	38
3.2.5.2 Uji Reliabilitas.....	39
3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik	40
3.2.6 Metode Regresi Berganda	41
3.2.7 Analisis Koefisien Korelasi	42
3.2.8 Uji Hipotesis	43
3.2.8.1 Uji Parsial (t)	43
3.2.9 Koefisien Determinasi	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.2 Pembahasan	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Reliasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2015-2019	5
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel 3.2	Daftar Populasi Badan Keuangan Kota Gorontalo	35
Tabel 4.1	: Skala Penilaian Jawaban Responden	48
Tabel 4.2	: Jawaban Responden X1.....	48
Tabel 4.3	: Jawaban Responden X2.....	49
Tabel 4.4	: Jawaban Responden X3.....	50
Tabel 4.5	: Jawaban Responden X4.....	50
Tabel 4.7	: Jawaban Responden Y.....	51
Tabel 4.8	: Hasil Uji Validitas X1.....	52
Tabel 4.9	: Hasil Uji Validitas X2.....	53
Tabel 4.10	: Hasil Uji Validitas X3.....	54
Tabel 4.11	: Hasil Uji Validitas X4.....	54
Tabel 4.13	: Hasil Uji Validitas Y.....	55
Tabel 4.14	: Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.15	: Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.16	: Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.17	: Hasil Uji Variabel	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3.1 Uji Rancangan Hipotesis	43
Gambar 4.1 Regresi Berganda	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Penelitian	78
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 3 Surat keterangan penelitian.....	80
Lampiran 4 Surat rekomendasi bebas plagiasi.....	81
Lampiran 5 Hasil Turnitiin.....	82
Lampiran 6 Curiculum vitae.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang Penelitian*

Reformasi yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun telah merambah hampir semua aspek kehidupan. Salah satu aspek utama reformasi adalah pemerintahan. Aspek pemerintahan yang bermasalah adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang muncul adalah keharusan untuk memberikan otonomi yang semakin nyata kepada daerah (pemerintah daerah), khususnya di tingkat daerah / kota. Pasca era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, hal tersebut menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik untuk menraih goog governance, karena goog governance telah menjadi paradigma baru yang sangat dianut oleh masyarakat. (Halim dan Iqbal, 2012: 35)

Demi terwujudnya tata keuangan yang baik (*good governance*) pemerintah terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara diantaranya dengan menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuagan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai pembendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Management keuangan daerah telah diperbarui. Dengan otonomi semacam ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus keluarganya sendiri, dengan intervensi minimal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kekuasaan yang luas dan dapat menggunakan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Namun demikian, mempunyai kekuasaan yang sedemikian luas tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangannya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pemberian hak dan kewenangan yang luas kepada daerah pada hakikatnya merupakan tugas yang harus dipertanggungjawabkan dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sisa dana kepada seluruh daerah di Indonesia., (Halim, dkk, 2010: 119).

Menurut (Halim dan Iqbal, 2012: 115), tanggung jawab yang dibebankan oleh undang-undang adalah untuk dapat mengurus keluarga sendiri, dan pemerintah daerah berkewajiban merumuskannya dalam satu bentuk: misi, visi, dan tujuan daerah yang diraih dalam bentuk perencanaan. Dan anggaran. Dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah harus menyusun rencana yang matang untuk menraih tujuan yang telah ditetapkan. Rencana ini dipersiapkan dengan cermat dan akan digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahap pelaksanaan tugas

status. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk merumuskan keuangan nasional / daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dan diusulkan dalam bentuk anggaran (Halim dan Iqbal, 2012: 138). Halim dan Iqbal, (2012: 173) Management keuangan daerah telah diperbarui. Dengan otonomi semacam ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus keluarganya sendiri, dengan intervensi minimal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kekuasaan yang luas dan dapat menggunakan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Namun demikian, mempunyai kekuasaan yang sedemikian luas tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangannya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pemberian hak dan kewenangan yang luas kepada daerah pada hakikatnya merupakan tugas yang harus dipertanggungjawabkan dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sisa dana kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pada kondisi yang lebih teknis, reformasi yang terus berjalan menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta unit pelaksanaan lain (SKPD) untuk terus bekerja keras. Penyusunan anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi yang mampu menghasilkan neraca dan laporan realisasi anggaran yang handal serta proses pengelolaan keuangan daerah lainnya seperti diperlakukannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi merupakan hal mendesak untuk terus dihayati.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembebanan entitas terkait dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, dapat diketahui perkiraan sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakpastian risiko sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi yang menunjukkan apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah digunakan sesuai dengan keekonomian, efisiensi dan efektivitas, anggaran yang ditetapkan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertindak sebagai alat perencanaan dan alat kontrol, serta alat pertanggungjawaban pengelolaan dana, untuk mengimplementasikan rencana sebagai alat pertanggungjawaban, Menurut Mardiasmo (2014:33) akuntabilitas Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, pernyataan dan laporan, serta keterbukaan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemanfaatan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewenangan dan bertanggung jawab untuk itu, yaitu DPRD dan masyarakat.

Badan Keuangan Kota Gorontalo merupakan salah satu SKPD yang berada pada pemerintah Kota Gorontalo, yang pada dasarnya mematuhi segala peraturan-peraturan yang mengikat sebagai pedoman dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, yang tentunya terkait dengan segala perangkat serta aturan dalam menyelenggarakan program-program kegiatan serta pengelolaan keuangan.

Berikut ini adalah perkembangan keuangan dalam konteks keuangan Badan Keangan Kota Gorontalo pada Laporan Realisasi Anggaran selama perkembangan kurun waktu lima tahun terakhir pada tabel 1.1 di bawah ni:

Tabel 1.1 Laporan Reliasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Kota Gorontaloo Tahun 2015-2019

Tahun	PENDAPATAN			BELANJA		
	Anggaran	Realisasi	100 %	Anggaran	Realisasi	100 %
2015	Rp4.656.384.657.040	Rp8.289.729.326.857	178	Rp5.030.990.947.220	Rp4.384.063.307.135	87
2016	Rp5.224.751.759.780	Rp4.741.573.835.597	91	Rp5.564.950.690.540	Rp4.935.526.831.524	89
2017	Rp5.044.442.663.760	Rp4.730.593.850.455	94	Rp5.076.278.818.035	Rp4.675.987.944.564	92
2018	Rp5.135.656.200.320	Rp4.702.445.066.457	92	Rp5.271.059.805.123	Rp4.595.088.908.789	87
2019	Rp5.176.487.179.825	Rp4.979.143.189.804	96	Rp5.396.642.621.758	Rp4.883.391.596.941	90

Sumber: LRA Tahun 2015-2019 Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat terlihat perubahan realisasi dan anggaran untuk masing –masing pos pendapatan dan belanja per tahun. Dalam setiap tahun, terjadi perubahan jumlah pendapatan dan belanja. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi presentasi efisiensi penyerapan anggaran belanja maupun efektifitas pendapatan. Jika dilihat pada pos pendapatan daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dari tahun ke tahun presentase efektifitas pendapatan daerah bersifat fluktuatif. Hal yang perlu disoroti adalah penurunan drastis presentase efektifitas pendapatan daerah dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015 presentase efektifitas pendapatan adalah 178% sedangkan pada tahun 2016 presentase menunjukan angka 91% atau mengalami penurunan sebesar 87%. Meskipun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan presentase yang tidak signifikan, realisasi

tidak menraih target 100% atau dibawah standar yang tadinya sudah dianggarkan. Selain tu, kenaikan efektifitas pada tahun 2017 juga hanya ditopang oleh penurunan anggaran yang menyebabkan presentase efektifitas pun kut naik. Hal ni tidak menunjukkan bahwa efektifitas realisasi pendapatan mengalami kenaikan performa. Rasio efektifitas pendapatan yang rendah dapat berdampak pada banyak hal dalam sektor perekonomian negara. Jika kita menganalisa data tabel diatas, rendahnya realisasi anggaran pendapatan selalu diikuti oleh penurunan anggaran maupun realisasi pos belanja negara. Tentu hal ni dapat berdampak pada perlambatan ekonomi karena jika rendahnya realisasi anggaran pendapatan selalu mengakibatkan perlambatan penyerapan anggaran belanja, maka pekerjaan maupun rencana pembangunan menjadi terhambat oleh karena turunnya rasio efektifitas dan efisiensi dari pendapatan dan belanja.

Selain tu, dari segi belanja daerah, presentasi efisiensi penyerapan anggaran mengalami penurunan terbanyak dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu turun dari 92% ke 87% atau mengalami penurunan sebesar 5%. Dalam hal Badan Keuangan Kota Gorontalo, penyerapan anggaran diperlukan untuk menjadi stimulus penggerak kinerja ataupun performa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Realisasi anggaran belanja yang terhambat dapat mengakibatkan kinerja yang menurun karena terhambatnya dana yang akan dipakai untuk kekrusialan berbagai hal. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyerapan anggaran belanja yang tepat sasaran menjadi faktor kunci penggerak kinerja organisasi pemerintah dalam upaya mendorong dan memberikan stimulus untuk menopang roda perekonomian. Oleh karena tu,

realisasi anggaran belanja yang rendah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja kepemerintahan

Berdasarkan paparan analisa data diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan realisasi dan belanja belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum terlaksana pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dapat dilihat dari laporan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sampai 2019.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses penraihan anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai akuntabilitas dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output/outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, (Anggarini dan Puranto, 2010: 101).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan membahasnya dalam bentuk laporan penelitian yang diberi judul “**Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja (X) secara simultan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?

2. Seberapa besar pengaruh tahap Persiapan anggaran (*Budget Preparation*) (X1) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh tahap ratifikasi (*Approval/ ratification*) (X2) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?
4. Seberapa besar pengaruh tahap mplementasi (*Implementation*) (X3) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?
5. Seberapa besar pengaruh tahap pelaporan dan evaluasi (*Reporting & Evaluation*) (X4) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja (X) secara simultan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tahap Persiapan anggaran (*Budget Preparation*) (X1) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tahap ratifikasi (*Approval/ ratification*) (X2) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tahap implementasi (*Implementation*) (X3) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tahap pelaporan dan evaluasi (*Reporting & Evaluation*) (X4) secara parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memahami dengan baik bagaimana pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Badan Keuangan Kota Gorontalo Memberikan informasi serta masukan kepada peneliti mengenai pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KAJIAN PUSTKA, KERANGAKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 *Kajian Pustaka*

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2014: 191), anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja berupa pendapatan dan pengeluaran. Anggaran tersebut dinyatakan dalam bentuk tindakan moneter yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tertentu, dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi kinerja. .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara menyebutkan bahwa anggaran merupakan alat pertanggungjawaban, pengelolaan dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi untuk menraih pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pendapatan untuk menraih tujuan nasional.

Menurut indra,(2010:202) anggaran berbasis kinerja mempakan system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. Menumt Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP berkaitan dengan pengukuran kineija yang memuat anggaran berbasis kineija untuk mengetahui hasil raihan proggram dengan visi dan misi nstansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, dimana

meliputi seluruh kegiatan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang.

2.1.2 Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja

Kementerian Keuangan (2014: 33) menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu metode dalam sistem perencanaan anggaran nasional yang secara jelas menunjukkan keterkaitan antara alokasi dana dengan kinerja yang diharapkan dari alokasi belanja, dan menitikberatkan pada penraihan kinerja. efektivitas. Mahmudi (2011: 45) Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mempertimbangkan keterkaitan antara anggaran (masukan) dan keluaran (keluaran) dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan rencana, termasuk realisasi keluaran dan hasil tersebut. efisiensi. Halim dan Kusufi (2014: 88) meyakini bahwa penganggaran berbasis kinerja disiapkan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam penganggaran tradisional dan penganggaran kinerja, yang menekankan pada konsep value for money.

Menurut Nordiawan (2010:67) terdapat beberapa karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja yaitu sebagai berikut :

- a) Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran menurut fungsi dan kegiatan, unit organisasi dan rincian pengeluaran.
- b) Survei dan pengukuran kegiatan untuk meningkatkan efisiensi beban maksimum dan standar.
- c) Anggaran untuk periode yang akan datang didasarkan pada beban unit standar dikalikan dengan jumlah unit kegiatan yang diharapkan selama periode tersebut.Bastian (2010:35) menjelaskan bahwa setelah

diterapkannya anggaran berbasis kinerja ternyata mempunyai keunggulan, yaitu meliputi :

- a. Memungkinkan pendeklegsian weweneng dalam pengambilan keputusan.
- b. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses penghsulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
- c. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam penbuatan keputusan.
- d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.
- e. Menghindarkan pemborosan.

Menurut Kementerian Keuangan (2016:154) ruang lingkup di dalam penganggaran berbasis kinerja dibagi dalam beberapa lingkup, yaitu sebagai berikut

1. Menentukan visi dan misi (merefleksikan strategi organisasi), tujuan, sasaran dan sasaran.Mengidentifikasi visi, misi, tujuan, sasaran dan sasaran adalah tahap awal yang harus ditetapkan organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang ingin diraih sehingga setiap indikator kinerja Harus dikaitkan dengan komponen ini. Oleh karena itu penentuan komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat..
2. Tentukan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat penraihan tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja haruslah merupakan hal-hal yang dapat diperhitungkan dan diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi atau melihat tingkat kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai dan berguna (bekerja).

Menurut Kementerian Keuangan (2015: 129), indikator kinerja antara lain::

- a) Satu jenis. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan sebelumnya dan ditetapkan. Indikator masukan meliputi dana, Tahap Ratifikasi, sarana dan prasarana, data dan informasi lain yang diperlukan
- b) Output adalah apa yang terjadi karena proses tertentu menggunakan input yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator output digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kemajuan atau tolok ukur suatu kegiatan, yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dan terukur. Hasil (result) adalah keluaran yang dapat digunakan secara langsung atau hasil nyata dari keluaran tersebut. Indikator hasil ditentukan tujuan rencana.
- c) Manfaat adalah nilai tambah hasil, dan manfaat akan muncul setelah jangka waktu tertentu. Indikator manfaat menunjukkan tujuan yang diharapkan yang dapat menyelesaikan keluaran dan menraih fungsi terbaik.
- d) Dampak merupakan akibat atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat suatu kegiatan Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa jenis manfaat yang telah terjadi, Dampak hanya dapat dilihat setelah jangka

waktu tertentu. Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program

Kegiatan ini melibatkan persiapan peringkat alternatif dan kemudian membuat keputusan mengenai rencana / kegiatan yang dianggap prioritas. Pemilihan dan prioritas rencana / kegiatan dilakukan dengan sumber daya yang terbatas..

e) Analisa Standar Beban (ASB)

ASB adalah standar beban suatu rencana atau kegiatan, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih masuk akal. Penerapan ASB dapat meminimalkan kesepakatan antara lembaga administrasi dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga membuat anggaran menjadi tidak efisien. Dalam penyusunan ABK harus memamati prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data pada saat pengambilan keputusan anggaran, jangka waktu perencanaan anggaran daerah, struktur APBN atau APBD, dan penggunaan ASB. Saat menyusun ABK, krusial untuk mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan anggaran.

Menurut Yuwono, ndrajaya, dan Hariyandi (2005:98) terdapat persyaratan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan baik di lembaga pemerintah daerah yaitu:

- a. Pertama, keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran karena DPRD merupakan wakil dari masyarakat sehingga dalam proses perencanaan anggaran harus diberikan agar menimbulkan konsekuensi DPRD yang

harus proaktif dan dapat menetapkan dua pokok hal yaitu arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD.

- b. Kedua, adanya desentralisasi wewenang hingga ke level unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggaran digunakan untuk alokasi sejumlah dana kepada unit kerja untuk mengelola sumber dana yang ada.

Bagian pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa anggaran berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada analisis penraihan kinerja, indikator kinerja, standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum. Selain itu, dalam tafsir Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian efisiensi dan efektivitas anggaran, hal-hal berikut harus diamati dalam rencana anggaran:

- a) Penerapan serta jelas tujuan dan sasaran, hasil, dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin diraih.
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Berdasarkan teori di atas, penganggaran berbasis kinerja merupakan alat kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menraih maksud dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam Renja-SKPD, setiap anggaran rupiah yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen kinerja suatu instansi dapat diperhitungkan sebagai kemanfaatan anggotanya kepada DPR dan masyarakat luas..

2.1.3 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diamatiya prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007:87) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus bisa menyampaikan berita yang kentara perihal tujuan,target, hasil, dan manfaat yg diperoleh rakyat asal aktivitas atau proyek yang dianggarkan. Anggota rakyat mempunyai hak serta hak akses yang sama untuk tahu proses penganggaran, karena menyangkut asa serta kekrusialan masyarakat terutama buat memenuhi kebutuhan masyarakat. warga jua berhak bertanggung jawab atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran..

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yg direncanakan ialah asumsi yang wajar dan terukur yg bisa diraih buat setiap asal pendapatan. Sedangkan belanja anggaran buat setiap pos / artikel artinya belanja maksimal . anggaran belanja wajib didukung menggunakan agunan pendapatan yg relatif, serta tidak ada alasan buat melaksanakan aktivitas / proyek tanpa anggaran atau tanpa anggaran. menggunakan kata lain, penggunaan setiap item aturan wajib sesuai menggunakan aktivitas / item yang diusulkan

3. Keadilan anggaran

Mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan cara yang tepat Keadilan, agar semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya tanpa ada diskriminasi dalam pemberian layanan, karena kawasan pada dasarnya diperoleh melalui partisipasi seluruh masyarakat..

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan cara yang tepat keadilan, agar semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya tanpa ada diskriminasi dalam pemberian layanan, karena kawasan pada dasarnya diperoleh melalui partisipasi seluruh masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan metode kinerja mengutamakan upaya untuk memperoleh hasil kerja (luaran / hasil) dari beban yang telah ditetapkan atau rencana alokasi masukan. Hasil pekerjaan harus sama dengan atau lebih besar dari beban atau input yang ditentukan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme di setiap organisasi kerja terkait.

2.1.4 Tujuan Anggaran Berbasis

Tujuan pelaksanaan penganggaran kinerja (PP 21/2004) dibelakang.

- a) untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya yang terbatas (masukan)
- b) mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya
- c) memperkuat proses pengambilan keputusan politik dalam jangka menengah.

Sejalan dengan Pedoman Perencanaan dan Reformasi Anggaran (2009), tujuan anggaran berbasis kinerja adalah:

- a) menunjukkan hubungan antara pendanaan dan kinerja yang ingin diraih (hubungan langsung antara hasil dan anggaran).
- b) Meningkatkan efisiensi dan transparansi implementasi (efisiensi operasional).

- c) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*)

2.1.5 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karateristik anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan aturan Berbasis Kinerja menurut Asmoko (2016), antara lain :

- a) Pengeluaran aturan didasarkan di outcome yg ingin diraih
- b) Adanya korelasi antara masukan menggunakan keluaran yg ingin diraih
- c) Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan aturan berbasi kinerja
- d) Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja

2.1.6 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam implementasi anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim (2007:27) menyebutkan elemen-elemen krusial yang wajib diaplikasikan sebelumnya dalam anggaran berbasis kinerja adalah:

- a) Target yang disepakati dan ukuran pencapaiannya
- b) Pengumpulan informasi yang berdasarkan sistem mengenai penraihan penraihan kinerya dapat diandalkan dan konsisten, sehingga beban dapat dibandingkan dengan kinerja. Memberikan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan untuk management rencana, pemrograman, penganggaran dan evaluasi

2.1.7 Unsur-unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Pada rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur yang harus dipahami dengan baik sang seluruh pihak yang terkait dengan aplikasi

anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur pokok aturan berbasis kinerja yg harus dipahami menurut Bastian (2006:64) antara lain:

- a) Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan
- b) *Perfomnce measrement* (Pengukuran hasil kinerja)
- c) *Proggram reporrtting* (Pelaporan program)

2.1.8 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009:120) mengedepankan krusialnya Anggaran berbasis kinerja kepada pemerintahan, dikarenakan beberapa alasan seperti :

- a. “Anggaran adalah instrumen bagi pemerintah untuk mengrahkan pembangunan social ekonomi, menjamin keberlangsungan dan menaikkan kualitas hidup warga”.
- b. “Anggaran krusial karena kebutuhan dan keinginan rakyat yang tak ada habisnya dan terus meningkat, sedangkan sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi. Anggaran dibutuhkan karena timbul masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*),pilihan (*Choice*), dan *trade offs*”
- c. “Anggaran dibutuhkan untuk membuat yakin bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik adalah instrumen pengadaan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga publik yang ada.”

2.1.9 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Nordiawan (2006:145) mengatakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain :

2.1.9.1 Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi yaitu satu perspektif yang jauh kedepan untuk memberi gambaran mengenai suatu keadaan yang harus diraih oleh sebuah organisasi. dari sudut pandang lain, visi dan misi harus bisa :

- 1) Merefleksikan apa yang ingin diraih
- 2) Memberikan tujuan dan fokus strategi yang definitif
- 3) Mempunyai orientasi masa depan
- 4) Memunculkan seluruh unsur organisasi

2.1.9.2 Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan merupakan satu hal yang akan diraih dalam jangka waktu satu tahun atau yang sering disebut dengan tujuan operasional karena tujuan operasional adalah hasil dari visi dan misi satu organisasi.

2.1.9.3 Penetapan Aktivitas

Penetapan aktivitas adalah sesuatu yang fundamental dalam pembuatan anggaran karena penentuan aktivitas ditentukan berdasarkan rencana organisasi dan tujuan operasional yang telah disepakati

2.1.9.4 Evaluasi dan pengambilan keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah tahap selanjutnya setelah penyusunan usulan anggaran, karena alur tersebut dapat diraih sesuai dengan aturan buku yang disepakati oleh organisasi, dan juga dapat memberikan kebebasan kepada setiap unit untuk menentukan klasifikasi peringkat.

2.1.10 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Undang Undang nomor 17 Tahun 2003 wacana Keuangan Negara menjelaskan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selaku pemakai anggaran membuat rencana kerja dan aturan memakai metode sesuai penraihan kerja yang akan diraih. buat dapat menyusun RAPBD berdasarkan penraihan kerja atau aturan Berbasis Kinerja (ABK) dibutuhkan Tahap Ratifikasi yg bisa pada pelaksanaanya.

Tahap-tahap utama penerapan aturan berbasis kinerja menjadi berikut:

1. Penyusunan Rencana Stratejik

Untuk membuat anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga harus sebelumnya menyusun rencana strategis (restra). Isi Restra menguraikan arah organisasi harus pergi dan bagaimana (strategi) untuk menraih tujuan ini.

- 1) Pernyataan visi dan misi
- 2) Rumusan mengenai target dan sasaran
- 3) Penjeleasan mengenai cara menraih tujuan dan sasaran

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah tahap awal yang sangat krusial, yakni sinkronisasi proggram dan kegiatan maupun subkegiatan. Tahap ini dimaksudkan untuk :

1. Mengurutkan alur integrasi antara sub kegiatan, kegiatan, dan proggram terhadap kebijakan yang mendasarinya
2. Memastikan bahwa kegiatan /subkegiatan yang dicanangkan pasti akan menghasilkan output yang mendukung penraihan sasaran /kinerja proggram.

3. Memastikan bahwa sasaran /kinerja program akan mendukung penraihan tujuan kebijakan.
4. Memastikan keterkaitan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2.1.11 Indikator Penganggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009: 70-73) dimensi dan indikator anggaran berbasis kinerja meliputi empat tahap, antara lain:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada proses penganggaran, pengeluaran diestimasi berdasarkan estimasi pendapatan yang dimiliki. Terkait hal itu, maka perlu dipahami adalah perlu melakukan estimasi penerimaan yang lebih akurat sebelum menyetujui belanja anggaran. Selain itu, Anda harus waspada bahwa jika Anda memperkirakan anggaran pendapatan sambil memutuskan anggaran pengeluaran, ada masalah yang berbahaya.

2. Tahap Ratifikasi (*Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap politik yang rumit dan berat. Pemimpin eksekutif tidak hanya perlu mempunyai kemampuan management yang memadai, kemampuan penjualan dan kemampuan membangun aliansi, tetapi juga pada tahap ini, integritas dan persiapan psikologis yang tinggi dari para eksekutif sangat krusial, yang sangat krusial, karena pada tahap ini, pemimpin eksekutif harus mempunyai kemampuan sebagai berikut: Jawab semua pertanyaan dan argumen badan legislatif dan berikan argumen yang masuk akal.

3. Tahap implementasi (implementasi)

Setelah anggaran disepakati oleh legislatif, tahap selanjutnya yaitu eksekusi anggaran. Dalam tahap implementasi anggaran, hal terkrusial yang harus diamati oleh seorang manager keuangan publik adalah mempunyai sistem akuntansi (informasi) dan sistem pengendalian management. Dalam hal ini, pengelola keuangan publik bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang relevan dan reliabel untuk menyusun dan mengontrol anggaran yang telah distujui, bahkan dapat menggunakan sistem akuntansi tersebut pada tahap penyusunan anggaran periode anggaran berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah laporan anggaran dan evaluasi. Penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahapan pelaporan dan evaluasi terkait dengan sistem pertanggungjawaban. Jika tahap implementasi didukung oleh sistem akuntansi dan pengendalian management yang baik, diharapkan tidak banyak masalah pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

2.2.2 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2009: 21) Akuntabilitas adalah konsep yang lebih luas daripada management. Penatagunaan mengacu pada pengelolaan kegiatan yang efektif secara ekonomi tanpa memikul tanggung jawab kewajiban pelaporan, dan

pertanggungjawaban mengacu pada sistem akuntabilitas penatalayan kepada mereka yang memberikan tanggung jawab.

Menurut Turner dan Hull (Marterasmo, 2009: 21), akuntabilitas merupakan konsep kompleks yang lebih sulit diraih daripada pemberantasan korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik menuntut institusi sektor publik untuk lebih fokus pada akuntabilitas horizontal daripada akuntabilitas vertikal. Menurut Indra (2010: 88) akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja adalah raihan kinerja tujuan dan sasaran kinerja dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja dan perbandingan raihan indikator kinerja tahun saat ini dan tahun sebelumnya.

2.2.2.1 Macam-macam Akuntabilitas

Mardiasmo (2009: 21) akuntabilitas terbagi atas dua jenis, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip - prinsip sebagai berikut:

- 1) Adanya Tahap Persiapan dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat penraihan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada penraihan visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam penraihan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014, akuntabilitas merupakan rangkaian kegiatan, perangkat dan prosedur sistemik yang dirancang untuk menentukan dan mengukur, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan data dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Mengumpulkan dan melaporkan kinerja ke lembaga pemerintah. Agen pemerintah.

Menurut Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, Akuntabilitas pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kewajiban untuk

menggambarkan sukses tidaknya misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan, antara lain::

1. Rencana Strategik

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil, yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu tahun) sampai dengan 5 tahun dengan memamati potensi, peluang dan keterbatasan yang ada atau yang mungkin ada. Proses ini menyusun rencana strategis bagi instansi pemerintah yang sekurang-kurangnya mempunyai visi, misi, sasaran, sasaran, strategi, kebijakan dan rencana, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya..

2. Perencanaan Kinerja

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan rencana, kebijakan dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini adalah rencana kerja tahunan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan oleh visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi penraihan setiap indikator untuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan penraihan tujuan. Selain itu, dilakukan analisis tanggung jawab kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara realisasi kinerja kegiatan dengan rencana dan

kebijakan untuk menraih tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditentukan dalam rencana strategi.

4. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban yang digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada masing-masing instansi pemerintah untuk menggunakan anggaran. Dalam penulisan laporan kinerja, yang terkrusial adalah evaluasi dan evaluasi kinerja, serta keterbukaan penuh atas hasil analisis evaluasi kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam menraih tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem pertanggungjawaban reguler..

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Indraswari Kusumaningrum (2010)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan regresi berganda sebagai dasar pengoperasian variabel	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Pengendalian akuntansi menjadi variabel yang memiliki pengaruh terbesar dalam

			kinerja pemerintah	instansi pemerintah
Anggie Veronica Claura (2015)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi Pegawai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis	Penelitian ini menggunakan path analysis dengan menambahkan Kompetensi Pegawai sebagai variabel independen yang memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas	Hasil menyatakan Kompetensi tidak menambahkan Kompetensi Pegawai sebagai variabel independen yang memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas	penelitian bahwa aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. hal ni dikarenakan terdapat beberapa indikator kompetensi aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana dengan baik. Hasil total raihan responden menunjukkan Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi masih di bawah rata rata. Penambahan pengetahuan dan keahlian dalam bidang akun-tansi,serta tanggung jawab pada dampak dalam pengelolaan sistem akuntansi dan penganggaran masih belum maksimal.ini ditandai dengan nilai raihan terendah yang diperoleh untuk tem tersebut.dan terlihat adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan prestasi kerja.sehingga pegawai yang ditempatkan bekerja di luar keahliannya menjadi kurang efektif bila mereka berada di posisi yang tidak tepat.tidak jarang hal

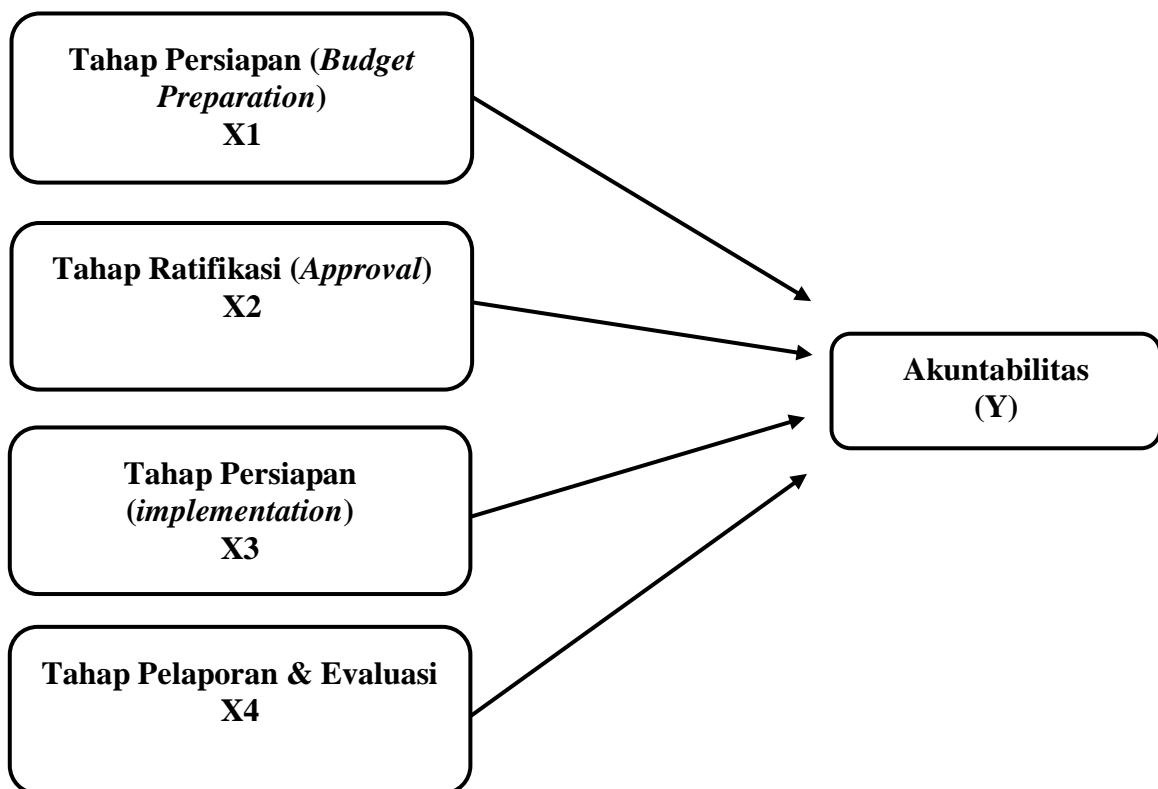
			tersebut disebabkan oleh kebijakan pimpinaninstansi tu sendiri
--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Mahmudi (2011:72) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memamati keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan proggram termasuk efisiensi dalam penraihan keluaran dan hasil tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2014:67), anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdpat dalam anggaran tradisional dan anggaran kinerja menekankan pada konsep *value for money*.

Menurut ndra (2010: 88) akuntabilitas merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja adalah raihan kineija tujuan dan sasaran kinerja dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kmerja dan perbandingan raihan ndikator kinerja tahun saat ni dan tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut ni:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kepada hasil dari penelitian- penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ni peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
2. Tahap Persiapan Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
3. Tahap implementasi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

4. Tahap mplementasi (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
5. Tahap pelaporan dan evaluasi (X4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka yang menjadi objek dalam penelitian ni adalah penganggaran berbasis kinerja Terhadap akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ni berdasarkan pada jenis penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable atau lebih. Menurut Sugiyono, (2015) “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dengan menggunakan nstrumen penelitian kuantitatif yang menggambarkan data yang dapat ditarik kesimpulannya”

Populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 2014:55)

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

3.2.2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil. ndra Bastian (2006) berpendapat bahwa penganggaran berbasis kinerja adalah: penganggaran berbasis kinerja adalah

sistem penganggaran yang "output" -nya bagi organisasi berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

Menurut Pasal 7 ayat 1, PP No. 21/2004, penganggaran berbasis kinerja mempertimbangkan hubungan antara dana dan keluaran yang diharapkan dan hasil dalam anggaran, termasuk efisiensi penraihan hasil dan keluaran tersebut. Pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa penganggaran berbasis kinerja memerlukan indikator kinerja, standar beban dan evaluasi kinerja untuk setiap jenis rencana dan kegiatan.

3.2.2.2 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) menelaskan bahwa sistem akuntabilitas adalah tugas wali amanat untuk memberikan informasi, akuntabilitas, pernyataan, laporan dan pengungkapan semua kegiatan, dan wali mempunyai hak dan kekuasaan untuk menuntut pertanggung jawaban yang telah diberikan.”.

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas maksud dari variabel-variabel penelitian, maka dilakukan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Penganggaran Berbasis Kinerja (X)	1. Tahap Persiapan Anggaran (<i>Budget Preparation</i>)	1. Penetapan Visi, Misi dan Strategi 2. Pembuatan Tujuan 3. Penetapan Aktivitas 4. Pengambilan Keputusan	Ordinal
	2. Tahap Ratifikasi (<i>Approval/Ratification</i>)	1. Persetujuan Anggaran 2. Pengajuan secara komprehensif	

	3. Tahap implementasi <i>(Implementation)</i>	1. Pelaksanaan anggaran 2. Acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD 3. Prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja	Ordinal
	4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi <i>(Reporting & Evaluation)</i>	1. Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APDB 2. Evaluasi Atas proggarm dan kegiatan 3. Evaluasi terhadap efisiensi, dan efektivitas 4. Reward yang diberikan kepada SKPD	Ordinal
Akuntabilitas (Y)		1 Rencana Strategik 2. Perencanaan Kinerja 3. Pengukuran Kinerja 4. Pelaporan Kinerja	Ordinal

Sumber: Mardiasmo (2009: 70-73) dan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.3.1 Populasi

Menurut Riduwan (2014:55) populasi merupakan “objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian”. Dengan demikian yang termasuk populasi dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo periode 2015-2019.

Berdasarkan kriteria diatas, badan keuangan kota gorontalo yang terpilih menjadi 78 populasi pada penelitian ni adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Populasi Badan Keuangan Kota Gorontalo

No	Nama	Jumlah Pegawai
1	Plt. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo	1
2	Sekretaris	3
3	Bidang Pendapatan	4
4	Bidang anggaran	4
5	Bidang Perbendaharaan	4
6	Bidang Akuntansi	4
7	Bidang Aset	4
8	Staff Pegawai	54
Total		78

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo

3.2.1.2 Sampel

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua. Sampel adalah subyek kelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasi secara tepat, dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan penentu penarikan sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ni menggunakan metode sensus dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 78 orang.

3.2.4 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ni adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu “data yang berwujud angka-angka dan diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data

kualitatif menjadi data kuantitatif, bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang (Riduwan, 2014:106)”.

3.2.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ni adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data tambahan pelengkap data primer yang bersumber dari nformasi-informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ni, seperti literatur-literatur berupa buku-buku, majalah dan koran.

3.2.4.3 Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ni proses pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Riduwan (2014:105) adalah “ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian”.

3.2.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ni, peneliti menggunakan alat bantu Software statistik SPSS Version 21 untuk mempermudah proses pengelolahan data. Proggram tersebut akan menghasilkan output berupa hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan, kemudian hasil pengolahan data tersebut dinterpretasikn dan akan dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data tersebut. Adapun pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.5.1 Uji Validitas

Uji validitas nstrumen dengan menguji validitas konstruksi (construct validity), maka dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts), setelah

nstrumen dikonstruksikan dengan para ahli dengan cara dimintai pendapatnya mengenai nstrumen yang telah disusun tu.

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel.. Selanjutnya dengan memberikan nterpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian validitas peneliti dengan menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh *pearson* yang dikenal dengan rumus korelasi *pearson product moment* (PPM) sebagai berikut

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n.\sum X^2).(\sum Y^2) - (\sum Y^2)}}$$

Dimana :

- r = Angka korelasi
- X = Skor pertanyaan (ke-n) variabel X
- Y = Skor pertanyaan (ke-n) variabel Y
- XY = Skor pertanyaan dikali total pernyataan

Kriteria pengujian untuk taraf nyata $\alpha = 0.05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dinyatakan valid dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dinyakan tidak valid dimana distribusi t yang digunakan mempunyai $d = (n-2)$, rumus yang digunakan yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = test (hitung)

r = korelasi antar variabel X dan Y

n = Jumlah sampel

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu nstrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

nstrumen tersebut sudah baik dan dapat dipertahankan konsistensinya. instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban – jawaban tertentu. nstrumen yang sudah dapat dipercaya atau yang relabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Untuk menghitung reliabilitas dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k - 1} \right) \left(1 - \frac{\sum si}{st} \right)$$

Keterangan :

K = Jumlah nstrumen pernyataan

si = Jumlah varians dalam setiap nstrumen

s = Varians keseluruhan nstrumen

Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 dan jika *cronbach alpha* < 0,60 dikatakan tidak *reliable*. Semakin nilai alpanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OSL (Ordinary Least Square) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Maka syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu

bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu). Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson.

3.2.6 Metode Regresi Berganda

Metode ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh inflasi terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*).

Adapun persamaan yang regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Di mana:

Y : Akuntabilitas

a : Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0a(X_1, X_2 dan $X_3 = 0$)

β_1 : Koefisien regresi berganda antara variabel X_1 terhadap variabel terikat Y

β_2 : Koefisien regresi berganda antara variabel X_2 terhadap variabel terikat Y

β_3 : Koefisien regresi berganda antara variabel X_3 terhadap variabel terikat Y

β_4 : Koefisien regresi berganda antara variabel X_4 terhadap variabel terikat Y

X_1 : Tahap Persiapan Anggaran (*Budgeting Preparation*)

X_2 : Tahap Ratifikasi (*Approval/ Ratification*)

X_3 : Tahap Implementasi (*Implementation*)

X_4 : Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

e : *error*

3.2.7 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien korelasi berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Jadi tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Symbol dari besaran korelasi adalah r yang disebut koefisien korelasi sedangkan symbol parameternya p (dibaca rho).

Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu makin besar nilai variabel X (independen), makin besar pula nilai variabel Y (dependen) atau makin kecil nilai variabel X (independen), maka makin kecil pula nilai variabel Y (dependen).
- b. Jika nilai $r < 0$ artinya telah terjadi hubungan yang linier negative, yaitu makin kecil nilai variabel X maka makin besar nilai variabel Y, atau makin besar nilai variabel X maka makin kecil nilai variabel Y.
- c. Nilai $r = 0$ artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dengan variabel Y.
- d. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ telah terjadi hubungan linier sempurna, yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0, maka garis makin tidak lurus.

Rumus korelasi *product moment*:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}$$

3.2.8 Uji Hipotesis

3.2.8.1 Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil dari uji t dapat diihat dari hasil output SPSS 21. Bila t hitung lebih besar dari tabel serta tingkat signifikannya (p-value) lebih kecil dari 5% ($\alpha: 5\% = 0,05$), maka hal ni menunjukan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ni berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara parsial.

Rumus Uji t

$$t_{\text{hitung}} = \frac{Bi - (Bi)}{sbi}$$

Dimana :

bi = koefesien regresi parsial sampel

Bi = koefesien regresi parsial populasi

Sbi = standar eror koefesien regresi sampel

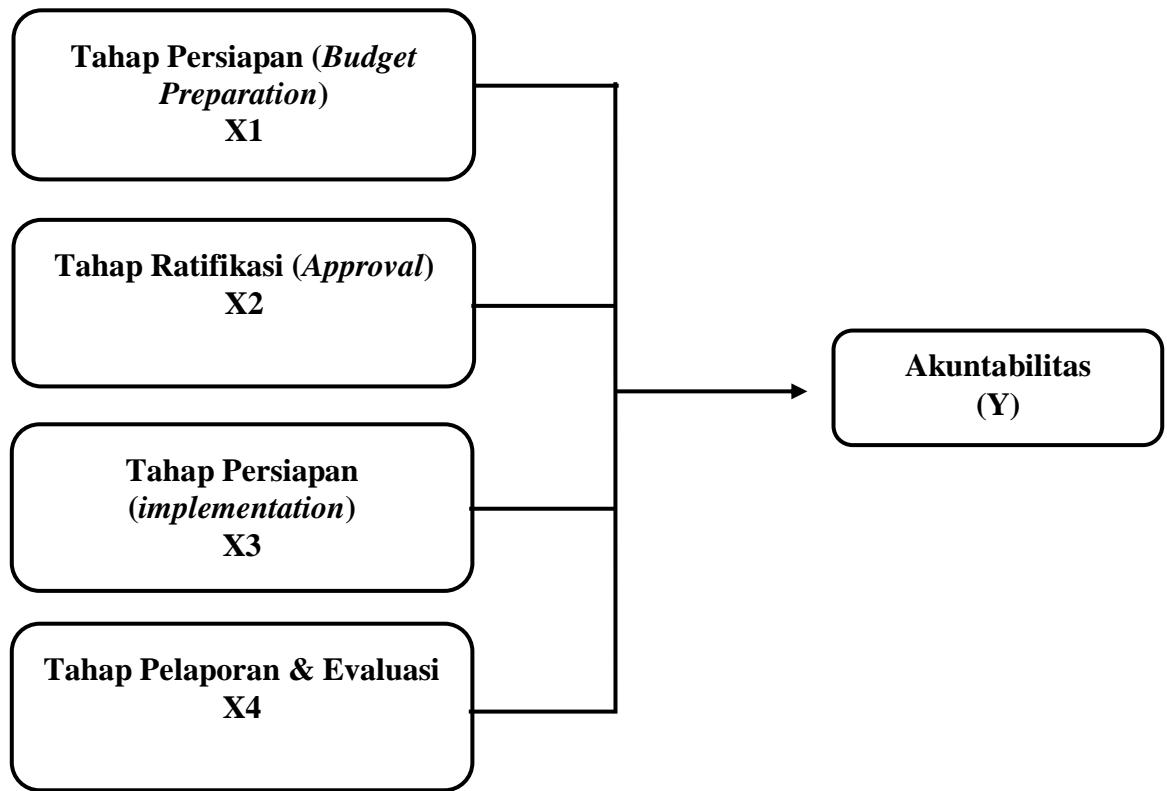
Pengujian parsial terhadap koefesien regresi secara parsial menggunakan uji t pada tingkat keyakinan 95 % dan tingkat kesalahan dalam analisa (α) 5 % (0,5) dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = $n-k-1$, dimana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel.

Keputusan :

Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$: H_0 ditolak dan H_1 diterima

Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$: H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Gambar : 3.1 Uji Rancangan Hipotesis



3.2.9 Koefisien Determinasi

Metode ni digunakan untuk mengukur ketepatan dari model analisis yang dibuat. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel ndependen terhadap variabel dependen. Bila r^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan maka pengaruh dari variabel religiusitas nflasi (X) terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) (Y) semakin besar. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi.

Rumus Koefisien Determinasi:

$$r^2 = \frac{b(n\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\{(n\sum Y^2)(\sum Y)\}^2}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tugas membantu Walikota Gorontalo dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo. Badan Keuangan Kota Gorontalo awalnya disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagaimana dirubah terakhir namanya berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut, Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tugas dan fungsi yang mencakup:

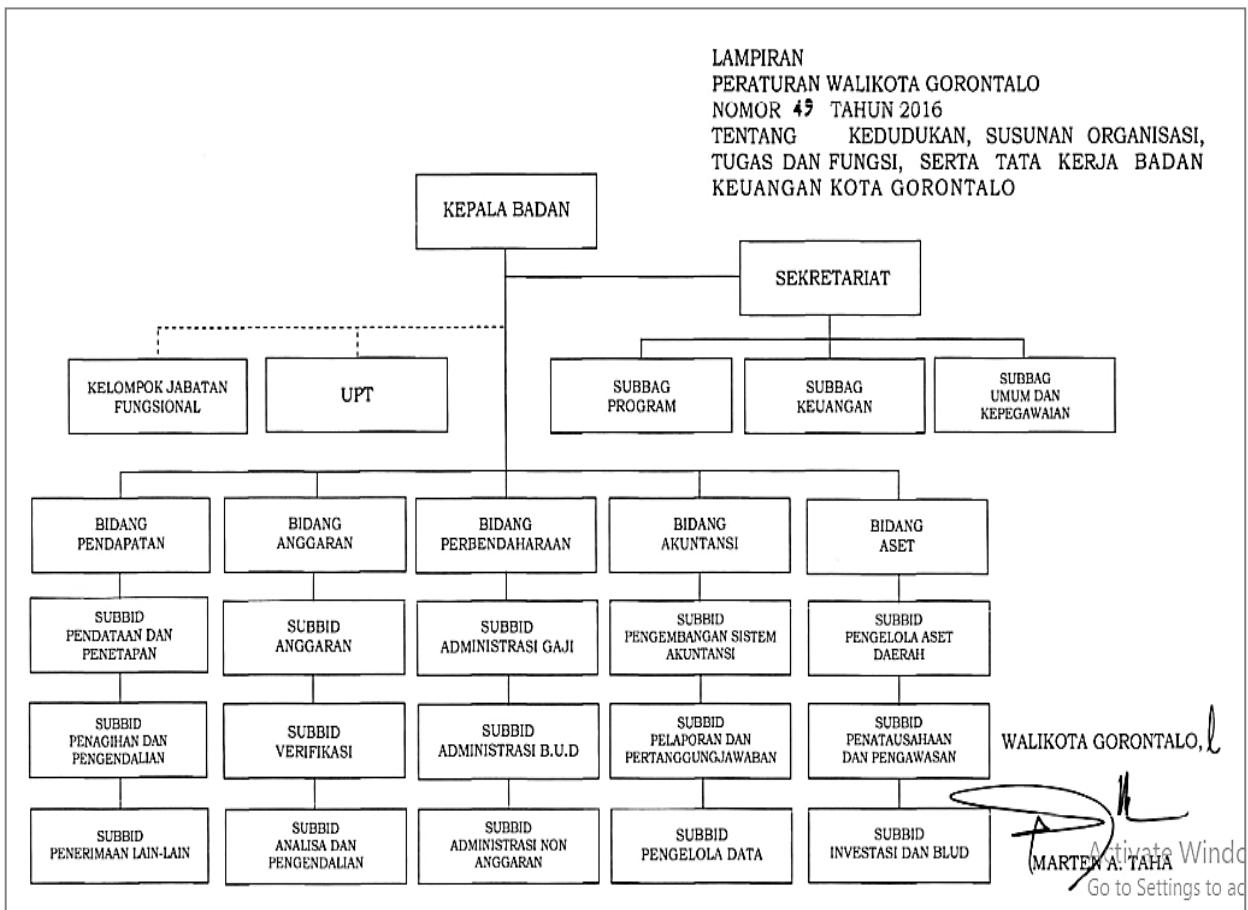
1. Melakukan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Melaksanakan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tujuan organisasi maka yang menjadi arahnya adalah Visi dan Misi dari suatu orngasisasi tersebut, Badan Keuangan Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan berdasarkan Visi yakni “*Menjadi Institusi Pengelola*

Keuangan yang Inovatif”. Didalam mewujudkan visi tersebut, Badan Keuangan Kota Gorontalo mengembangkan misi organisasi yang mencakup”

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja baik antar SKPD dan lembaga lain yang saling bekerja sama;
4. Meningkatkan pelayanan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja;
5. Memantapkan Pelaksanaan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencarian Sasaran Kinerja.

Untuk melaksanakan misi dalam mewujudkan visi, Badan Keuangan Kota Gorontalo menjalankan organisasi didukung dengan SDM yang professional dengan standar prosedur yang jelas berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian. Diaman kerangka kerja dari masing-masing bagian dapat digambarkan dalam struktur organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagaimana terlampir dala Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, yakni sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Walikota Gorontalo No. 49 Tahun 2016

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 78 orang dan kuisioner disebarluaskan kepada seluruh responden tersebut. Dari total responden yang ada, peneliti berhasil mengumpulkan kuesioner sebanyak 64 kuesioner. Sebanyak 12 kuesioner tidak kembali karena beberapa responden masih dalam tugas lapangan dan lainnya belum terisi pada saat pengumpulan. Dari 64 kuesioner tersebut, diperoleh bobot butir instrument dari masing-masing variabel yang kemudian di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekwensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Berikut Proses perhitungannya:

Bobot Terendah X Item X Jumlah Responden : 1 X 1 X 64 = 64

Bobot Tertinggi X Item X Jumlah Responden : 5 X 1 X 64 = 320

$$\text{Skala Interval} = \frac{320 - 64}{5} = 51$$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala

penelitian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Skala Penilaian Jawaban Responden

No.	Rentang	Kategori
1.	64 – 115	Sangat Rendah
2.	116 – 166	Rendah
3.	167 – 218	Sedang
4.	219 – 269	Tinggi
5.	270 – 320	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olahan Data

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variabel yang menjadi objek penelitian:

1. Tahap Persiapan (X1)

Hasil Tabulasi data variabel Tahap Persiapan (X1) yang diisi oleh 64 responden dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Variabel Tahap Persiapan (X1)

BO-BOT	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)														
	Tahapan Persiapan Anggaran (X1)														
	Item 1.1			Item 1.2			Item 1.3			Item 1.4			Item 1.5		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	34	170	53,1%	32	160	50,0%	34	170	53,1%	32	160	50,0%	26	130	40,6%
4	27	108	42,2%	30	120	46,9%	28	112	43,8%	26	104	40,6%	34	136	53,1%
3	3	9	4,7%	2	6	3,1%	2	6	3,1%	4	12	6,3%	3	9	4,7%
2	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2	4	3,1%	1	2	1,6%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	64	287	100,0%	64	286	100,0%	64	288	100,0%	64	280	100,0%	64	277	100,0%
Ket	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sub variable Tahap Persiapan (X1), berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item X1.1 termasuk kategori sangat tinggi, item X1.2 kategori sangat tinggi, item X1.3 kategori sangat tinggi, item X1.4 kategori sangat tinggi dan item X1.5 kategori sangat tinggi.

2. Tahap Ratifikasi (X2)

Hasil Tabulasi data variabel Tahap Ratifikasi (X2) yang diisi oleh 64 responden dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Tanggapan Responden Variabel Tahap Ratifikasi (X2)

BOBOT	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)					
	Tahap Retifikasi (X2)					
	Item 2.1		Item 2.2			
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	33	165	51,6%	31	155	48,4%
4	15	60	23,4%	19	76	29,7%
3	7	21	10,9%	10	30	15,6%
2	9	18	14,1%	4	8	6,3%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	64	264	100,0%	64	269	100,0%
Ket	Tinggi		Tinggi			

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sub variable Tahap Ratifikasi (X2), berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item X2.1 termasuk kategori tinggi dan item X2.2 termasuk dalam kategori tinggi.

3. Tahap Implementasi (X3)

Hasil Tabulasi data variabel Tahap Implementasi (X3) yang diisi oleh 64 responden dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Tanggapan Responden Variabel Tahap Implementasi (X3)

BO-BOT	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)								
	Tahap Implementasi (X3)								
	Item 3.1			Item 3.2			Item 3.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	36	180	56,3%	33	165	51,6%	33	165	51,6%
4	24	96	37,5%	24	96	37,5%	25	100	39,1%
3	4	12	6,3%	6	18	9,4%	6	18	9,4%
2	0	0	0,0%	1	2	1,6%	0	0	0,0%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	64	288	100,0%	64	281	100,0%	64	283	100,0%
Ket	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sub variabel Tahap Implementasi (X3), berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item X3.1 termasuk kategori sangat tinggi, item X3.2 kategori sangat tinggi dan item X3.3 kategori sangat tinggi.

4. Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4)

Hasil Tabulasi data variabel Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4) yang diisi oleh 64 responden dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Tanggapan Responden Variabel Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4)

BO-BOT	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)											
	Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4)											
	Item 4.1			Item 4.2			Item 4.3		Item 4.4			
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	37	185	57,8%	38	190	59,4%	32	160	50,0%	34	170	53,1%
4	19	76	29,7%	15	60	23,4%	24	96	37,5%	19	76	29,7%
3	3	9	4,7%	4	12	6,3%	4	12	6,3%	4	12	6,3%
2	5	10	7,8%	7	14	10,9%	4	8	6,3%	7	14	10,9%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	64	280	100,0%	64	276	100,0%	64	276	100,0%	64	272	100,0%
Ket	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sub variable Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4), berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item x4.1 termasuk kategori sangat tinggi, item x4.2 termasuk kategori sangat tinggi, item x4.3 termasuk kategori sangat tinggi dan item X4.4 kategori sangat tinggi.

5. Akuntabilitas (Y)

Hasil Tabulasi data variabel Akuntabilitas (Y) yang diisi oleh 64 responden dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.6.
Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas (Y)**

BO-BOT	AKUNTABILITAS (Y)											
	Item Y.1			Item Y.2			Item Y.3			Item Y.4		
	F	Skor	%									
5	27	135	42,2%	33	165	51,6%	31	155	48,4%	29	145	45,3%
4	34	136	53,1%	28	112	43,8%	25	100	39,1%	26	104	40,6%
3	3	9	4,7%	2	6	3,1%	6	18	9,4%	9	27	14,1%
2	0	0	0,0%	1	2	1,6%	2	4	3,1%	0	0	0,0%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	64	280	100,0%	64	285	100,0%	64	277	100,0%	64	276	100,0%
Ket	Sangat Tinggi											

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sub variable Akuntabilitas (Y), berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item Y.1 termasuk kategori sangat tinggi, item Y.2 kategori sangat tinggi, item Y.3 kategori sangat tinggi dan item Y.4 kategori sangat tinggi.

4.1.3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap validitas dan realibilitas data. Instrumen penelitian dinyatakan valid apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dinyatakan tidak valid, sedangkan pengukuran reliabilitas dinyatakan dalam bentuk: jika α lebih besar dari 0,6 dinyatakan reliabel dan α lebih kecil dari 0,6 dinyatakan tidak reliabel.

1. Uji Validitas sub variabel Tahap Persiapan (X1)

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran diperoleh hasil uji instrumen sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji validitas Variabel Tahap Persiapan Anggaran (X1)

Item	Penganggaran Berbasis Kinerja (X)				
	Tahap Persiapan Anggaran (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
R	0,677	0,613	0,708	0,791	0,834
r²	0,458	0,376	0,501	0,626	0,696
N	64	64	64	64	64
r √n - 2	5,331	4,827	5,575	6,228	6,567
√1 - r²	0,736	0,790	0,706	0,612	0,552
t hitung	7,243	6,109	7,894	10,180	11,902
t tabel	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003
Keterangan	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Tahap Persiapan (X1) menunjukkan hasil yang valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian dapat dilanjutkan pada pengujian reliabilitas.

2. Uji Validitas sub variabel Tahap Ratifikasi (X2)

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran diperoleh hasil uji instrumen sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Hasil Uji validitas Variabel Tahapan Ratifikasi (X2)

Item	Penganggaran Berbasis Kinerja (X)	
	Tahap Retifikasi (X2)	
	X2.1	X2.2
r	0,958	0,941
r²	0,918	0,885
n	64	64
r √n - 2	7,543	7,409
√1 - r²	0,287	0,338
t hitung	26,305	21,895
t tabel	2,003	2,003
Keterangan	VALID	VALID

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Tahap Ratifikasi menunjukkan hasil yang valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian variabel dapat dilanjutkan pada tahapan pengeujian reliabilitas.

3. Uji Validitas sub variabel Tahap Implementasi (X3)

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran diperoleh hasil uji instrumen sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji validitas Vriabel Implementasi (X3)

Item	Penganggaran Berbasis Kinerja (X)		
	Tahap Implementasi (X3)		
	X3.1	X3.2	X3.3
r	0,863	0,826	0,855
r ²	0,745	0,682	0,731
n	64	64	64
r √n - 2	6,795	6,504	6,732
√1 - r ²	0,505	0,564	0,519
t hitung	13,451	11,539	12,981
t tabel	2,003	2,003	2,003
Keterangan	VALID	VALID	VALID

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Tahap Implementasi menunjukkan hasil yang valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian variabel dapat dilanjutkan pada tahapan pengeujian reliabilitas.

4. Uji Validitas variabel Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4)

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran diperoleh hasil uji instrumen sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Hasil Uji validitas Variabel Tahap Pelaporan Dan Evaluasi

Item	Penganggaran Berbasis Kinerja (X)			
	Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4)			
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4
r	0,862	0,907	0,893	0,915
r ²	0,743	0,823	0,797	0,837
n	64	64	64	64
r √n - 2	6,787	7,142	7,031	7,205
√1 - r ²	0,507	0,421	0,450	0,403
t hitung	13,390	16,958	15,624	17,858
t tabel	2,003	2,003	2,003	2,003

Keterangan	VALID	VALID	VALID	VALID
Sumber : Data Olahan				

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Tahap Pelaporan Dan Evaluasi menunjukkan hasil yang valid, Keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian variabel dapat dilanjutkan pada tahapan pengeujian reliabilitas.

5. Uji Validitas variabel Akuntabilitas (Y)

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran diperoleh hasil uji instrumen sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji validitas Variabel Akuntabilitas

Item	Akuntabilitas (Y)			
	Y1	Y2	Y3	Y4
r	0,823	0,738	0,783	0,712
r²	0,677	0,545	0,613	0,507
n	64	64	64	64
r √n - 2	6,480	5,811	6,165	5,606
√1 - r²	0,568	0,675	0,622	0,702
t hitung	11,408	8,611	9,912	7,984
t tabel	2,003	2,003	2,003	2,003
Keterangan	VALID	VALID	VALID	VALID

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Akuntabilitas menunjukkan hasil yang valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian variabel dapat dilanjutkan pada tahapan pengeujian reliabilitas.

4.1.4 Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas data, selanjutnya masing-masing variabel dilakukan pengujian reliabilitas data dimana pengukuran uji reliabilitas dilakukan dengan cara memberikan skor yang relatif sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Metode uji realibilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala atau skor rentan. Untuk penentuan apakah instrumen reliable atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sakaran (dalam Dwi Priyanto, 2011:69) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Adapun hasil pengujian reliabilitas data untuk masing-masing variabel dapat digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Data**

Variabel/Sub Variabel	Alpha	Standar	Ketarangan
Tahap Perencanaan Anggaran (X_1)	0,786	0,6	Reliabel
Tahap Ratifikasi (X_2)	0,916	0,6	Reliabel
Tahap Implementasi (X_3)	0,844	0,6	Reliabel
Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X_4)	0,840	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0,801	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Data

Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel pada tabel di atas, dari keseluruhan nilai *Cronbach's Alpha* diperoleh nilai realibilitas masing-masing diatas nilai standar 0,6, batasan *reliable*, dimana reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik,

maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut dinyatakan reliable, sebab nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari batasan 0,6.

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data pada penelitian ini, dengan dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Adapun hasil pengujian dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 4.13
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tahap Perencanaan	Tahap Implementasi	Tahap Ratifikasi	Tahap Pelaporan & Evaluasi	Akuntabilitas
N		64	64	64	64	64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	22,16	13,31	8,33	17,25	17,47
	Std. Deviation	2,269	1,699	1,919	3,357	2,062
Most Extreme Differences	Absolute	,207	,246	,231	,230	,203
	Positive	,152	,160	,192	,206	,168
	Negative	-,207	-,246	-,231	-,230	-,203
Test Statistic		,207	,246	,231	,230	,203
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

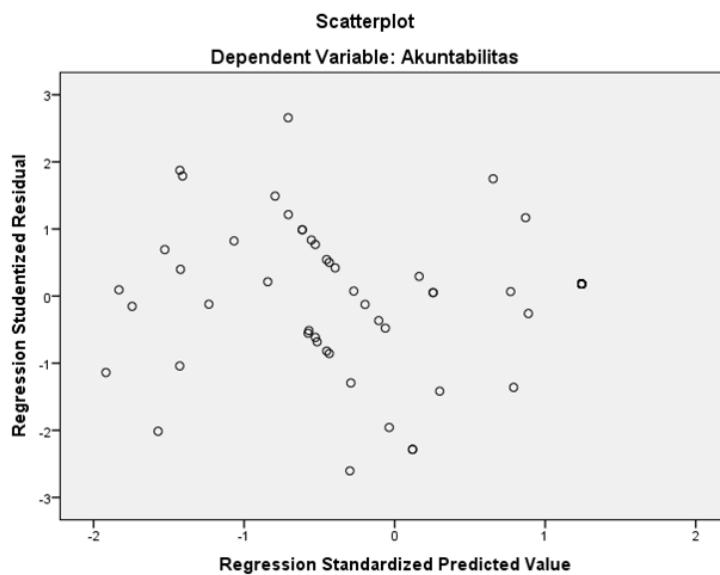
Berdasarkan Uji Kolmogorov Simirnov pada table di atas menunjukan nilai nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan masing-masing variabel memiliki nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas salah satunya adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heterokedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukan pada gambar grafik *scatter plot* seperti berikut ini:

Gambar 4.2
Garfik scatter plot



Berdasdarkan gambar grafik *scatter plot* di atas, menunjukan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola

tertentu. Hasil pengujian ini maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Pertama, Uji Durbin-Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas.

Adapun hasil uji autokorelasi dapat diuraikan dalam table berikut:

**Tabel 4.14
Uji Autokorelasi**

Model	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,867		,751	2,135

- a. Predictors: (Constant), Tahap Pelaporan & Evaluasi, Tahap Implementasi, Tahap Perencanaan, Tahap Ratifikasi
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukan nilai DW sebesar 2,135 dengan keputusan nilai DW berada di antara d_U sampai dengan $4 - d_U$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi. Dimana nilai $d_U=1,2437$ dan $d_L : 1,6505$, untuk nilai d_U dan d_L didasarkan pada tabel Durbin Winston.

4.1 Hasil Uji Data Statistik Penelitian

Pengujian analisis data statistik yang menggunakan metode regresi berganda, dimana hasil pengolahan data atas 64 orang responden maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Analisis Data Statistik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,061	1,040		1,021	,312
Tahap Perencanaan	,228	,083	,251	2,743	,008
Tahap Ratifikasi	,264	,098	,245	2,682	,009
Tahap Implementasi	,348	,085	,287	4,108	,000
Tahap Pelaporan & Evaluasi	,262	,045	,427	5,796	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan table hasil analisis di atas maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,061 + 0,228X_1 + 0,264X_2 + 0,348X_3 + 0,262X_4$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,061, hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (X) maka nilai Akuntabilitas (Y) sebesar 1,061. Koefisien variabel independen yakni faktor Tahap Persiapan (X1), menunjukkan nilai positif artinya bahwa $X_1 = 0,228$, menandakan Tahap Persiapan (X1) yang diukur terhadap Akuntabilitas (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya pengaruh faktor Tahap Persiapan yang secara langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas sebesar 0,162 atau 22,8%.

Faktor Tahap Ratifikasi (X2) menunjukan nilai positif artinya bahwa X2 = 0,264, menandakan Tahap Ratifikasi (X2) yang diukur terhadap Akuntabilitas (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya pengaruh faktor Tahap Ratifikasi yang secara langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas sebesar 0,264 atau 26,4%.

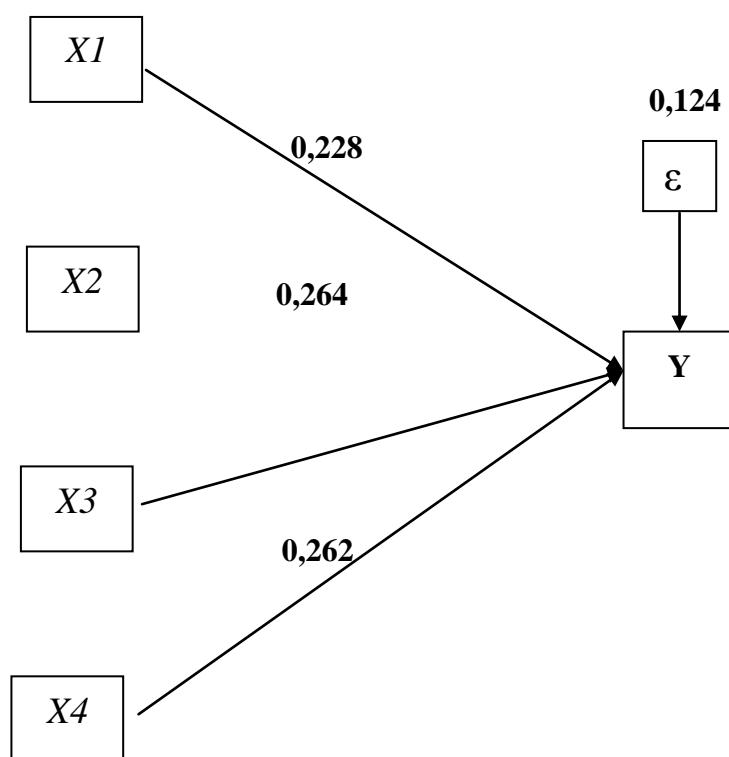
Faktor Tahap Implementasi (X3) menunjukan nilai positif artinya bahwa X3 = 0,348, menandakan Tahap Implementasi (X3) yang diukur terhadap Akuntabilitas (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya pengaruh faktor Tahap Implementasi yang secara langsung terhadap Akuntabilitas sebesar 0,348 atau 34,8%.

Faktor Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4) menunjukan nilai positif artinya bahwa X4 = 0,262, menandakan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4) yang diukur terhadap Akuntabilitas (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya pengaruh faktor Tahap Pelaporan Dan Evaluasi yang secara langsung terhadap Akuntabilitas sebesar 0,262 atau 26,2%.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data statistik sebagaimana terlampir, maka hasil analisis tersebut dapat di interpretasikan bahwa Nilai Koefisien Determinasi (*R Square*) sebesar 0,876, ini berarti 87,6% pengaruh yang ada terhadap Akuntabilitas, dijelaskan oleh faktor Penganggaran Berbasis Kinerja (X) yang mencakup Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi. Disamping itu masih faktor-faktor lain yang tidak diteliti tapi juga memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas serta masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Faktor-faktor tersebut ditunjukan dengan nilai

epsilon (ε) = 0,124 dimana terdapat variabel-variabel lain yang tidak diteliti dan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas sebesar 12,4% (100-87,6).

Hasil penelitian ini jika digambarkan dalam struktur analisis jalur yakni sebagai berikut:



Gambar 4.2 : Struktur Analisis Jalur

4.1.1 Pengujian Hipotesis

1. Penganggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil uji F_{hitung} menunjukkan hasil sebesar 103,962 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,52 dengan taraf signifikansi adalah 0,000. Berdasarkan uji F tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($103,962 > 2,52$) dan tingkat signifikansi $< \alpha =$

0,05 ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik variabel Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. **Jadi hipotesis pertama**, yang menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, **diterima**.

2. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja yang terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Uji t dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik menunjukkan bahwa variabel Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara parsial (terpisah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas dengan taraf signifikan ($<0,05$) dimana Tahap Persiapan (X1) = $0,008 < \text{sig } 0,05$, Tahap Ratifikasi (X2) = $0,009 < \text{sig } 0,05$, Tahap Implementasi (X3) = $0,000 < \text{sig } 0,05$ dan Tahap Pelaporan dan Evaluasi (X4) = $0,000 < \text{sig } 0,05$. Ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik variabel Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara parsial (terpisah)

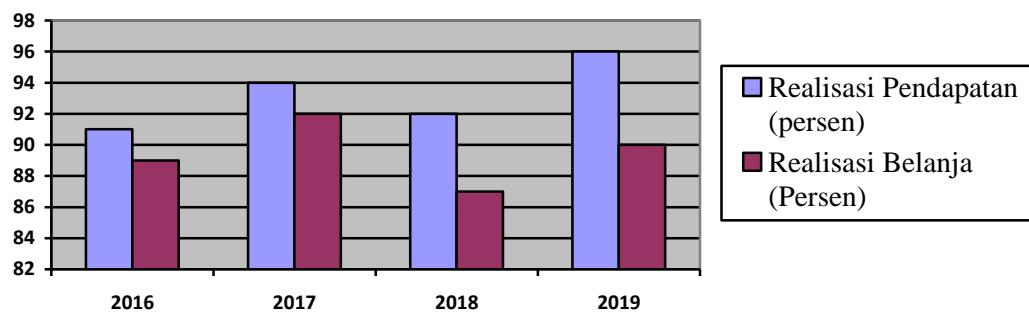
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas. Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, **diterima**.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa nilai F_{hitung} dengan 103,962 dan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi ditunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas penganggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hal ini dapat berarti bahwa apabila Badan Keuangan Gorontalo mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Laporan maka akuntabilitas dari Badan Keuangan Kota Gorontalo juga akan berpengaruh, Dengan demikian, jika Penganggaran Berbasis Kinerja yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara sama-sama ditingkatkan, maka akan meningkatkan Akuntabilitas anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Dampak Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja juga dapat terlihat pada data Laporan Realisasi Anggaran yang sudah diolah oleh penulis dan dapat dilihat pada tabeli dibawah ini



Dapat dilihat pada diagram diatas bahwa sejak pengimplementasian Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.02/2013 pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dapat terlihat realisasi anggaran pendapatan selalu konsisten berada diatas angka 90% yang berarti bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah yang telah dialokasikan sebelumnya pada Rapat Kerja Daerah selalu menunjukan kinerja yang konsisten. Sifat fluktuatif pada presentasi realisasi pendapatan dapat diakibatkan karena penganggaran yang tidak berdasarkan kinerja pada periode sebelumnya, hal ini karena proses penggaran tidak melalui tahapan-tahapan yang dapat mengaffirmasi sebuah anggaran dapat dikatakan realistik dan valid.(Munandar M :2001)

Selain itu realisasi belanja juga dapat ditekan sehingga pendapatan daerah konsisten memiliki kelebihan/surplus sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan efisiensi maupun efektifitas penggunaan dana daerah yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

meningkat sehubungan dengan adanya implementasi penganggaran berbasis kinerja

Hasil analisis statistic juga menunjukan nilai *R Square* = 0,876. Ini ditunjukkan bahwa 87,6% variasi dari variable Akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel Penganggaran Berbasis Kinerja yang terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa juga terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 12,4%.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki peranan penting didalam menghasilkan Akuntabilitas dalam porses pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Halim (2007:87) yang menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja memiliki prinsip salah satunya adalah akuntabilitas dan transparasi. Dijelaskan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud adalah anggaran harus dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tujuan, target, hasil, dan manfaat yg diperoleh masyarakat atas aktivitas atau program kegiatan yang dianggarkan. Setiap masyarakat mempunyai hak serta hak akses yang sama untuk mengetahui jalannya proses penganggaran.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip tersebut maka penganggaran berbasis kinerja merupakan alat kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meraih maksud dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam Renja-SKPD, setiap anggaran rupiah yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang kinerja suatu instansi dapat dipertanggung jawabkan pengelolaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas secara keseluruhan.

4.2.2 Tahap Persiapan Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data statistik yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, menunjukan bahwa Tahap Persiapan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,162 (22,8%). Hasil ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel tersebut terhadap Akuntabilitas, artinya bahwa jika penilaian terhadap Tahap Persiapan ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peringkatan Akuntabilitas sebesar 22,8%. Hasil observasi penulis mendapati bahwa tahap perencanaan dalam perencanaan berbasis kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah mencakup prosedur yang baku, hal-hal seperti: a) Dokumen anggaran yang diajukan menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai, b) Draft anggaran memiliki sasaran tujuan yang jelas, c) Dokumen anggaran mencakup seluruh kegiatan yang akan diadakan sehubungan dengan anggaran yang diajukan, d) Terdapat aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk mencapai sasaran anggaran, e) Dokumen anggaran diputuskan berdasarkan analisa keuangan yang komprehensif Semakin baik proses tahapan persiapan anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sehingga setiap anggaran yang direncanakan

berdasarkan data yang valid maupun dapat diandalkan dan berdampak pada pencapaian anggaran realisasi yang konsisten baik itu dari segi anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Avionita (2013:45) bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Variasi dalam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Pada proses penganggaran berbasis kinerja, aspek tahapan persiapan anggaran merupakan aspek awal perencanaan anggaran yang memperhitungkan semua aspek dan komponen yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan anggaran. Tahapan persiapan anggaran merupakan pondasi awal yang harus dipersiapkan secara matang, sehingga target kinerja dan jalannya proses pengelolaan anggaran dapat dipersiapkan secara matang sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diharapkan tanpa mengalami kendala dan masalah dalam proses pelaksanaannya. Menurut Mardiasmo (2015:70) menjelaskan bahwa tahap persiapan anggaran (*Budget Preparation*) mencakup taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi serta tujuan organisasi.

Selain itu, sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

Selain itu juga, pada tahapan persiapan anggaran, menurut Sancoko, dkk (2008:62) penganggaran berbasis kinerja harus mencakup komponen-komponen seperti visi dan misi yang hendak dicapai, tujuan dan sasaran yang menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan program yang merupakan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran, serta realiasi setiap kegiatan yang mencakup serangkaian pelayanan menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

4.2.3 Tahap Ratifikasi Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data statistik menunjukkan bahwa Tahap Ratifikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,264 (26,4%). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel tersebut terhadap Akuntabilitas, artinya bahwa jika penilaian terhadap Tahap Ratifikasi ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peringkatan Akuntabilitas anggaran sebesar 26,4%. Semakin baik proses tahapan rastifikasi anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Tahapan ratifikasi anggaran merupakan tahapan penting didalam memberikan kejelasan dan informasi mengenai rencana kerja anggaran serta renca

target yang ingin dicapai kepada masyarakat baik mencakup perwakilan masyarakat di DPRD, lembaga masyarakat, maupun masyarakat lainnya yang ingin memperoleh akses sehubungan pengelolaan anggaran yang nantinya akan dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2015:70) tahapan ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang rumit. Pimpinan dituntut memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi, dikarenakan pimpinan harus mempunyai kemampuan menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari legislatif sehubungan dengan rencana kerja anggaran dalam satu tahun periode.

Oleh karena itu, semakin baik pimpinan didalam melaksanakan proses tahapan ratifikasi anggaran dalam rangka melaksanakan tahapan penganggaran berasis kinerja, maka dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu periode. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat oleh lembaga atas pengelolaan sumber daya tersebut sehingga sinergitas dan pratisipasi dapat terjalin dalam rangka bersama-sama membangun daerah melalui program-program kegiatan yang nantinya akan direalisasi.

4.2.4 Tahap Implementasi Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data statistik menunjukan bahwa Tahap Impelmentasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,348

(34,8%). Hasil ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel tersebut terhadap Akuntabilitas, artinya bahwa jika penilaian terhadap Tahap Impelmentasi ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peringkatan Akuntabilitas anggaran sebesar 26,4%. Semakin baik proses tahapan implementasi anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tahapan implementasi anggaran merupakan tahapan dalam merelalisasikan anggaran yang sebelumnya telah dipersipakan atau direncanakan. Pada tahapan realisasi ini tentu sangat dibutuhkan aspek pengawasan dan pengendalian sehingga proses tahapan realisasi anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasilnya dapat dipertangung jawabkan. Menurut Mardiasmo (2015:70) tahapan implementasi anggaran membutuhkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen memadai. Bagian keuangan bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal dalam proses pencatatan dan pelaporan serta pengendalain atas pelaksanaan realisasi anggaran. Sehingga setiap aktivitas dapat direkam sehingga mudah untuk dipertangungjawabnkan.

Selain sebagai penyediaan laporan keuangan dan pengendalian, system informasi akuntasi mampu menyediakan data dan informasi yang akurat sehubungan proses realisasi anggaran. Sehingga pimpinan dapat dengan mudah melakukan pengndalian sewaktu-waktu diperlukan pada saat proses tahapan realisasi dilakukan. Sehingga tahapan realiasi dapat dilakukan secara afektif dan efiseisen serta seusai degan jalur yang direncanakan pada tahapan persipan

anggaran sebelumnya. Dukungan manajemen dalam hal ini menciptakan suasana koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan realisasi anggaran, sehingga kendala dan masalah yang ditemui dilapangan dapat dideteksi lebih awal serta dapat dicariakan salusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama proses realisasi anggaran. Oleh karena itu, kegiatan realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan anggaran memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik dalam menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam penyelenggaran pemerintahan.

4.2.5 Tahap Pelaporan Dan Evaluasi Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data statistik menunjukkan bahwa Tahap Pelaporan Dan Evaluasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas sebesar 0,262 (26,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel tersebut terhadap Akuntabilitas, artinya bahwa jika penilaian terhadap Tahap Pelaporan dan Evaluasi ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peringkatan Akuntabilitas anggaran sebesar 26,2%. Semakin baik proses tahapan pelaporan dan evaluasi anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Tahapan pelaporan dan evaluasi merupakan tahapan akhir dalam kegiatan penganggaran berbasis kinerja. Menurut Mardiasmo (2015:70) bahwa tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait aspek operasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait aspek akuntabilitas, sehingga apabila tahap

implementasi sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik maka tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan memenuhi masalah. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang memadai dalam proses realisasi anggaran memiliki peranan penting didalam mendukung dan menghasilkan laporan keuangan memadai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga proses kegiatan evaluasi juga dapat dijalankan berdasarkan data dan informasi yang valid dari dukungan sistem informasi yang memadai.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa , tahapan pelaporan dan evlusi akan lebih mudah dilakukan apabila serangkaian proses penganggaran berbasis kinerja didukung oleh sistem infomrasi akuntansi dan pengendalian manajemen yang memadai. Peloparan atas pelaksanaan penganggaran akan lebih obyektif serta menggambarkan informasi yang lengkap dan akurat sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar. Sehingganya, aspek pelaporan dan evaluasi merupakan bagian dari uapya mewujudkan akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran pada suatu instansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja (X) yang mencakup Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan Dan Evaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 87,6%, dengan nilai uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($103,962 > 2,52$) dan tingkat signifikansi $< \alpha = 0,05$.
2. Faktor Tahapan Tahap Persiapan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 22,8%. Semakin tinggi nilai tahapan persiapan maka semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Faktor Tahap Ratifikasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,4%. Semakin tinggi nilai tahapan ratifikasi anggaran maka semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
4. Faktor Tahap Implementasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 34,8%. Semakin tinggi nilai tahapan implementasi anggaran maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

5. Faktor Tahap Pelaporan Dan Evaluasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,2%. Semakin tinggi nilai tahapan pelaporan dan evaluasi maka semakin tinggi pula nilai akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

5.2 Saran

1. Bagi pimpinan Badan Keuangan Kota Gorontalo, disarankan untuk lebih meningkatkan aspek perencanaan anggaran atau tahapan persiapan anggaran. Hasil pengujian menunjukkan faktor tahapan persiapan anggaran memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan faktor lainnya dalam penganggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, sehingga program kegiatan yang direncanakan harus memiliki inovasi dan kreatif serta mencerminkan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih menerlit faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2015:70) bahwa faktor sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang memadai dapat memberikan pengaruh dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah & Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Universitas Udayana, Bali
- Avionita, Venni. 2013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Proggram Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Bandung
- Bastian, Indra. 2016. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra, & Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Juniversitas Udayana, Bali.
- Friska, Indriani Yulia. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Tahap Persiapan Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Jambi
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:Salemba Empat
- Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare. Universitas Hasanudin, Makassar.
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi. Vol. 13 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proggram IBM SPSS
19. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA.

- Isti'anah. 2010. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol. 5 No. 1.
- Kepala Lembaga Administrasi Negara. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 2003
- Mardiasmo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta:ANDI
- Mangkunegara, DR A.A Anwar Prabu. 2013. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Moheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Muda, Taufik Djundjung. 2005. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Disertasi. UNPAD. Jawa Barat
- Nina,Widiawati. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Nugroho, Yohames Anton. 2013. Olah Data dengan SPSS. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative
- Pemerintah Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran I : KUESIONER PENELITIAN

LEMBAR KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Nurlela Asta Hadju
NIM : E11.18.055
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS (Studi Empiris Pada BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Nurlela Asta Hadju

KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

- Nama Instansi : _____
- Nama Responden : _____
- Tanggal Pengisian : _____
- Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan
- Latar Belakang Pendidikan :
- Ekonomi / Akuntansi
 - Hukum
 - Teknik
 - Sosial
 - Lainnya
- Pendidikan Terakhir :
- SLTA/Sederajat
 - Diploma (D3)
 - Strata 1 (Sarjana)
 - Strata 2 (Master)
 - Strata 3 (Doktor)
- Jabatan :
- Kepala Badan/Dinas/Instansi
 - Sekretaris/Kabid/Kabag
 - Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Ka
 - sie Lainnya
- Lama Bekerja :
- 1 – 5 tahun
 - 6 – 10 tahun
 - 11 – 15 tahun
 - 16 – 20 tahun
 - ≥ 21 tahun
- Usia :
- 20 – 30 tahun
 - 31 – 40 tahun
 - 41 – 50 tahun
 - ≥ 51 tahun

B. Pernyataan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variabel kedua pelaksanaan anggaran, variabel ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dan variabel keempat adalah evaluasi kinerja. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Tahap Perencanaan (*Budgeting Preparation*)

1.	Dokumen anggaran
A.	Dokumen anggaran yang diajukan sangat menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai
B	Dokumen anggaran yang diajukan cukup menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai
C	Dokumen anggaran yang diajukan menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai
D	Dokumen anggaran yang diajukan kurang menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai
E	Dokumen anggaran yang diajukan tidak menjabarkan mengenai visi, misi dan strategi yang ingin dicapai

Tahap Ratifikasi (*Approval/ Ratification*)

1	Proses Persetujuan anggaran
A	selalu dilakukan secara transparan
B	sering dilakukan secara transparan
C	kadang-kadang dilakukan secara transparan
D	jarang dilakukan secara transparan
E	tidak pernah dilakukan secara transparan

2	Rancangan Anggaran
A	selalu memiliki cakupan data yang komprehensif
B	sering memiliki cakupan data yang komprehensif
C	kadang-kadang memiliki cakupan data yang komprehensif
D	jarang memiliki cakupan data yang komprehensif
E	tidak pernah memiliki cakupan data yang komprehensif

Tahap Implementasi (*Implementation*)

1	Pelaksanaan Anggaran
A	Selalu dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disetujui
B	Sering dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disetujui
C	Kadang-kadang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disetujui
D	Jarang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disetujui
E	Tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disetujui

2	Dasar Acuan Anggaran
A	Sangat sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja UU nomor 17 tahun 2003

B	Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja UU nomor 17 tahun 2003
C	Cukup sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja UU nomor 17 tahun 2003
D	Tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja UU nomor 17 tahun 2003
E	Sangat tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja UU nomor 17 tahun 2003

3	Proses pencapaian realisasi anggaran
A	Selalu melalui tahapan prosedur yang akuntabel dan transparan
B	Sering melalui tahapan prosedur yang akuntabel dan transparan
C	Kadang-kadang melalui tahapan prosedur yang akuntabel dan transparan
D	Jarang melalui tahapan prosedur yang akuntabel dan transparan
E	Tidak pernah melalui tahapan prosedur yang akuntabel dan transparan

Tahap Pelaporan & Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

1	Realisasi yang terlaksana
A	Selalu dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti realisasi-realisisasi
B	Sering dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti realisasi-realisisasi
C	Kadang-kadang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti realisasi-realisisasi
D	Jarang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti realisasi-realisisasi
E	Tidak pernah dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti realisasi-realisisasi

2	Proses Evaluasi Anggaran
A	Selalu diadakan setiap akhir periode anggaran direalisasikan
B	Sering diadakan setiap akhir periode anggaran direalisasikan
C	Kadang-kadang diadakan setiap akhir periode anggaran direalisasikan
D	Jarang diadakan setiap akhir periode anggaran direalisasikan
E	Tidak pernah diadakan setiap akhir periode anggaran direalisasikan

3	Realisasi anggaran diakhir periode
A	Selalu dikontrol melalui proses evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektifitas dana
B	Sering dikontrol melalui proses evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektifitas dana
C	Kadang-kadang dikontrol melalui proses evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektifitas dana
D	Jarang dikontrol melalui proses evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektifitas

	dana
E	Tidak pernah dikontrol melalui proses evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektifitas dana

4	SKPD
A	Selalu diberlakukan sistem Reward & Punishment untuk setiap kinerja yang dilakukan
B	Sering diberlakukan sistem Reward & Punishment untuk setiap kinerja yang dilakukan
C	Kadang-kadang diberlakukan sistem Reward & Punishment untuk setiap kinerja yang dilakukan
D	Jarang diberlakukan sistem Reward & Punishment untuk setiap kinerja yang dilakukan
E	Tidak pernah diberlakukan sistem Reward & Punishment untuk setiap kinerja yang dilakukan

Akuntabilitas (Y)

1	Rencana Stratejik
A	Selalu memiliki rencana stratejik yang menjadi pendekatan realisasi
B	Sering memiliki rencana stratejik yang menjadi pendekatan realisasi
C	Kadang-kadang memiliki rencana stratejik yang menjadi pendekatan realisasi
D	Jarang memiliki rencana stratejik yang menjadi pendekatan realisasi
E	Tidak pernah memiliki rencana stratejik yang menjadi pendekatan realisasi
2	Perencanaan Kinerja Yang Sistematis
A	Selalu dilakukan secara sistematis
B	Sering dilakukan secara sistematis
C	Kadang-kadang dilakukan secara sistematis
D	Jarang dilakukan secara sistematis
E	Tidak pernah dilakukan secara sistematis
3	Perencanaan Kinerja Yang Terukur
A	Selalu dilakukan secara terukur
B	Sering dilakukan secara terukur
C	Kadang-kadang dilakukan secara terukur
D	Jarang dilakukan secara terukur
E	Tidak pernah dilakukan secara terukur
4	Pelaporan Kinerja Yang Transparan
A	Selalu dilakukan secara transparan
B	Sering dilakukan secara transparan
C	Kadang-kadang dilakukan secara transparan
D	Jarang dilakukan secara transparan
E	Tidak pernah dilakukan secara transparan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2338/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Nurlela Asta Hadju
NIM	:	E1118055
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	:	PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 21 September 2020



+



**PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
BADAN KEUANGAN**

Jln. Nani Wartabone No.06 KelurahanIpiloKecamatan Kota Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ B.KEU/ ~~Ac~~ / 2021

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	NURLELA ASTA HADJU
N I M	:	E1118055
Jurusan	:	AKUNTANSI Universitas Ichsan Gorontalo

Adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan memperoleh data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa Sejarah Singkat Berdirinya Badan keuangan, Visi Misi, bagan Struktur Organisasi digunakan untuk kelengkapan Penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO”**. adapun data yang benar-benar real di dalam kegiatan Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 April 2021

An. **KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA GORONTALO**



MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

Pembina

Nip. 196811131989031005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0572/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	NURLELA ASTA HADJU
NIM	:	E1118055
Program Studi	:	Akuntansi (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi	:	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

4/27/2021 Nurlela astahadju.doc - E1118055

turnitin

skripsi_E1118055_Nurlelaastahadju_Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pada badan keuangan kota gorontalo_2017.doc
Apr 27, 2021
13426 words / 87635 characters

E1118055
Nurlela astahadju.doc

Sources Overview

25%
OVERALL SIMILARITY

Source	Similarity (%)
repository.unej.ac.id INTERNET	3%
repository.uln-suska.ac.id INTERNET	2%
kruibackpacker.blogspot.com INTERNET	1%
Yuerin Abdul, Julie J Sondakh, Jantje Tinanong. 'Pengaruh Faktor-Faktor Individual Terhadap Perilaku Elias Auditor Pada Inspektorat Pro... GROSNEF	1%
id.123dok.com INTERNET	1%
es.scribd.com INTERNET	1%
repository.widyatama.ac.id INTERNET	<1%
www.slideshare.net INTERNET	<1%
repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
media.neliti.com INTERNET	<1%
lonsuit.unismuhluwuk.ac.id INTERNET	<1%
etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 SUBMITTED WORKS	<1%
pt.scribd.com INTERNET	<1%
eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
text-id.123dok.com INTERNET	<1%

<https://ll-dikti-consortium1.turnitin.com/submit/submissions/oid:25211:6801370/print?locale=en> 1/65

		Nurjela astahadju.doc - E1110055	
17	ml.scribd.com INTERNET	<1%	
18	journal.iingorontalo.ac.id INTERNET	<1%	
19	id.scribd.com INTERNET	<1%	
20	edoc.pub INTERNET	<1%	
21	docplayer.info INTERNET	<1%	
22	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%	
23	e-journal.uajy.ac.id INTERNET	<1%	
24	www.scribd.com INTERNET	<1%	
25	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%	
26	dinkes.surabaya.go.id INTERNET	<1%	
27	ianhabaora.blogspot.com INTERNET	<1%	
28	www.jurnal.iingorontalo.ac.id INTERNET	<1%	
29	repository.upi.edu INTERNET	<1%	
30	ejournal.unikama.ac.id INTERNET	<1%	
31	www.mikroskil.ac.id INTERNET	<1%	
32	pt.slideshare.net INTERNET	<1%	
33	repository.bungabangsacirebon.ac.id INTERNET	<1%	
34	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%	
35	banjarmasin.bpk.go.id INTERNET	<1%	
36	jurnal.untag-sby.ac.id INTERNET	<1%	
37	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%	
38	repository.uinbanten.ac.id INTERNET	<1%	
39	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%	
40	idoc.pub INTERNET	<1%	

ABSTRAK**NURLELA ASTA HADJU. E1118055. PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penganggaran berbasis kinerja (X) yang mencakup tahap persiapan (X1), tahap ratifikasi (X2), tahap implementasi (X3) dan tahap pelaporan dan evaluasi (X4) baik secara simultan maupun parsial terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyajian secara deskriptif. Metode analisis data menggunakan regresi berganda berdasarkan data dari populasi yang terdapat pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penganggaran berbasis kinerja (X) yang mencakup tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 87,6%. Tahap persiapan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 22,8%. Tahap ratifikasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,4%. Tahap implementasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 34,8%. Tahap pelaporan dan evaluasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,2%.

Kata kunci: penganggaran berbasis kinerja, akuntabilitas



ABSTRACT

NURLELA ASTA HADJU. E1118055. THE EFFECT OF THE PERFORMANCE-BASED BUDGETING ON THE ACCOUNTABILITY AT THE FINANCIAL AGENCY OF GORONTALO MUNICIPALITY

This research aims to find out and analyze to what extent the simultaneous and partial effects of the performance-based budgeting (X) covering preparation stage (X_1), ratification stage (X_2), implementation stage (X_3), and reporting and evaluation stage (X_4) on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality. The research method implemented is the quantitative approach descriptively presented. The data analysis applies a multiple regression referring to the population data at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality. The research results indicate that the performance-based budgeting (X) covering preparation stage (X_1), ratification stage (X_2), implementation stage (X_3), and reporting and evaluation stage (X_4) positively and significantly determine the accountability at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 87,6%. The preparation stage (X_1) has a positive and significant effect on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 22,8%. The ratification stage (X_2) has a positive and significant influence on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 26,4%. The implementation stage (X_3) has a positive and significant impact on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 34,8%. The reporting and evaluation stage (X_4) has a positive and significant effect on the accountability (Y) at the Financial Agency of the Gorontalo Municipality by 26,2%.

Keywords: performance-based budgeting, accountability



CURRICULUM VITAE



1. Riwayat Pribadi

NAMA : NURLELA ASTA HADJU
NIM : E11.18.055
Tempat Tgl Lahir : GORONTALO, 20 JUNI 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : AKUNTANSI
Agama : Islam
Alamat : DESA POOWO, KEC. KABILA, KAB.
BONEBOLANGO

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Bersekolah di SDN Impres Dutohe, tahun lulus 2009
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang menegah pertama di SMP Negeri 1 kabila tahun lulus 2012
3. Selanjutnya melanjutkan belajar di SMK Negeri 4 kota Gorontalo, tahun Lulus 2015
4. Dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo,mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi